



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUSTINUS STORMANDI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **145122**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 465.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/105 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
5. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 334.050.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, MITSUBHISI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.550.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 71.300.021



F. HARTA LAINNYA	Rp.	695.000.000
Sub Total	Rp.	1.590.450.021
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.590.450.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.